

 **Musāwa**

Jurnal Studi Gender dan Islam

**RAGAM KAJIAN GENDER
DALAM JURNAL KEAGAMAAN ISLAM DI INDONESIA**

Muhammad Alfatih Suryadilaga

MENILIK BENTUK PERILAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Haiyun Nisa, Nanda Rizki Rahmita

**MENANGGAPI HADIS PEREMPUAN SEBAGAI
IMAM SHOLAT DALAM PERSPEKTIF AMINA WADUD
(ANALISIS HERMENEUTIKA FEMINISME)**

Mas'udah

**REINTERPRETASI AYAT GENDER DALAM MEMAHAMI RELASI
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN**

(Sebuah Kajian Kontekstual dalam Penafsiran)

Mayola Andika

RESISTENSI PEREMPUAN DALAM PROSA INDONESIA

Harjito

Vol. 17, No.2, Juli 2018

in Musāwa

Jurnal Studi Gender dan Islam



Pusat Studi Wanita
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Musawa

Jurnal Studi Gender dan Islam

Managing Editor:

Witriani

Editor in Chief:

Marhumah

Editorial Board:

Siti Ruhaini Dzhayatin (UIN Sunan Kalijaga)

Euis Nurlaelawati (UIN Sunan Kalijaga)

Masnun Tahir (UIN Mataram)

Siti Syamsiyatun (UIN Sunan Kalijaga)

Editors:

Muhammad Alfatih Suryadilaga

Alimatul Qibtiyah

Fatma Amilia

Zusiana Elly Triantini

Muh. Isnanto

TERAKREDITASI:

Nomor: 2/E/KPT/2015, Tanggal 1 Desember 2015

Alamat Penerbit/ Redaksi: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp./ Fax. 0274-550779

Email: pswsuk@yahoo.co.id

Website: psw.uin-suka.ac.id

Musawa Jurnal Studi dan Islam diterbitkan pertama kali Maret 2002 oleh PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerjasama dengan Royal Danish Embassy Jakarta. Mulai tahun 2008 terbit dua kali dalam setahun, bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF), yaitu bulan Januari dan Juli.

Redaksi menerima tulisan dengan tema Gender, Islam, dan HAM berupa hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan atau diterbitkan di media lain. Naskah diketik dengan ukuran kertas A4, spasi 1,5, menggunakan font Times New Roman/ Times New Arabic, ukuran 12 point, dan disimpan dalam Rich Text Format. Artikel ditulis dalam 5.000 – 10.000 kata sesuai dengan gaya selingkung Musawa yang dapat dilihat di halaman belakang. Naskah dikirimkan melalui Open Journal System (OJS) Musawa melalui alamat : <http://ejournal.uin-suka.ac.id/musawa>. Editor berhak melakukan penilaian tentang kelayakan suatu artikel baik dari segi isi, informasi, maupun penulisan.

Daftar Isi

RAGAM KAJIAN GENDER DALAM JURNAL KEAGAMAAN ISLAM DI INDONESIA <i>Muhammad Alfatih Suryadilaga</i>	95
MENILIK BENTUK PERILAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA <i>Haiyun Nisa, Nanda Rizki Rahmita</i>	107
MENANGGAPI HADIS PEREMPUAN SEBAGAI IMAM SHOLAT DALAM PERSPEKTIF AMINA WADUD (ANALISIS HERMENEUTIKA FEMINISME) <i>Mas'udah</i>	123
REINTERPRETASI AYAT GENDER DALAM MEMAHAMI RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (Sebuah Kajian Kontekstual dalam Penafsiran) <i>Mayola Andika</i>	137
RESISTENSI PEREMPUAN DALAM PROSA INDONESIA <i>Harjito</i>	153
FEMINISASI KEMISKINAN: STUDI TENTANG PENGEMIS PEREMPUAN PADA MASYARAKAT MATRILINEAL MINANGKABAU DI SUMATERA BARAT, INDONESIA <i>Welhendri Azwar, Muliono, Yuli Permatasari</i>	165
MARGINALISASI SEKSUALITAS PEREMPUAN PADA NOVEL CURAHAN HATI SANG SPG KARYA WENDA KOIMAN DAN THE CURSE OF BEAUTY KARYA INDAH HANACO (PERSPEKTIF ISLAM) <i>Fiqih Aisyatul Farokhah, Sri Kusumo Habsari, Mugijatna</i>	183

FEMINISASI KEMISKINAN: STUDI TENTANG PENGEMIS PEREMPUAN PADA MASYARAKAT MATRILINEAL MINANGKABAU DI SUMATERA BARAT, INDONESIA

Welhendri Azwar¹, Muliono², Yuli Permatasari³

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

¹welhendriazwar@uinib.ac.id, ²muliono191@gmail.com, ³yulipermatasari777@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini mencoba menjelaskan fenomena keterpinggiran kaum perempuan Minangkabau di Sumatera Barat. Beberapa konsep teoritik feminis digunakan untuk menganalisis bagaimana konstruksi sistem sosial masyarakat memposisikan perempuan dalam realitas kehidupannya. Lalu, membaca posisi ketertindasan perempuan dalam kemiskinannya atau kemiskinan perempuan dalam ketertindasannya. Pembahasan ini menjadi penting disebabkan fakta menunjukkan betapa banyak kaum perempuan Minang berjuang melawan kemiskinan yang sering terlihat melawan kodratnya. Pada posisi ini, pembahasan ini diharapkan dapat membuka pemahman atas dominasi perempuan dalam kultur Minangkabau, Sumatera Barat. Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif-fenomenologis, sebagai usaha eksplorasi dan klarifikasi yang kemudian menjelaskan fenomena pemiskinan kaum perempuan sebagai realitas sosial. Belenggu kemiskinan perempuan dalam studi ini dilatari oleh dua hal yaitu ketidakberdayaannya dalam melawan kultur yang bersifat paternalistik dan hambatannya dalam menemukan akses ekonomi yang lebih baik untuk kehidupan yang lebih bermartabat.

Kata Kunci: *Feminisme, feminisasi kemiskinan, sistem sosial, kultur, patriarki.*

Absrtact

This article explains the phenomenon of marginalization on Minangkabau women in West Sumatra. The author uses some feminist theoretical concepts to analyze how social construction puts women in their reality of life. Then, to read the position of women oppression in their poverty, or women's poverty in their oppression. This research is important because the facts show that many Minangkabau women struggle against poverty which often seems to be against their nature. In this position, this research is expected to reveal the understanding of women's dominance in Minangkabau culture, West Sumatra. This research uses a descriptive-phenomenological approach as an exploration and clarification effort, then explains the phenomenon of women's impoverishment as a social reality. The poverty shackles of women in this research are based on two things, namely their inadequacy against the paternalistic culture and its obstacles to find better economic access for a more dignified life.

Keywords: *Feminism, feminization of poverty, social systems, culture, patriarchy*

Pendahuluan

Proses pembangunan telah berjalan sejak beberapa dekade. Tetapi pada kenyataannya masih menyisakan sebuah mitos terutama terhadap kaum perempuan. Hal ini dapat dilihat hampir di segala bidang proses pembangunan masih, belum berpihak kepada perempuan. Sumber daya yang penting dalam kehidupan selalu dikuasai oleh pihak yang memiliki kekuatan sosial, ekonomi, dan politik lebih kuat yang cenderung dimiliki oleh laki-laki dan secara sosial erat dengan ideologi patriarki sehingga marginalisasi terhadap peran perempuan menjadi sesuatu yang tidak dapat elakkan.¹

Kajian mengenai kemiskinan cenderung tampak menjadi masalah sosial utama bagi masyarakat Indonesia yang hingga kini masih belum dapat dieradikasi seutuhnya, dan sebagian besar penduduk miskin di Asia Tenggara berada di Indonesia. Meskipun jumlah kemiskinan berdasarkan data BPS menunjukkan penurunan dari setiap periode, akan tetapi angka tersebut belum menunjukkan kesejahteraan yang signifikan terutama terhadap kaum perempuan. Di tengah kemiskinan seperti ini perempuan adalah kelompok yang rentan. Tingkat kematian ibu hamil di Indonesia, misalnya, dua kali lebih tinggi dari tingkat kematian di Filipina dan lima kali lebih tinggi dari Vietnam.² Pada sisi

lain masih banyak dari penduduk Indonesia tidak mempunyai akses yang cukup terhadap fasilitas sanitasi dan air bersih. Sementara program perliungan sosial yang tersedia tidaklah mencukupi dalam menurunkan tingkat resiko bagi keluarga miskin.³

Martha Chen (2005) menyebutkan, meskipun di era globalisasi saat ini data kesenjangan gender di banyak negara khususnya pada aspek pendidikan telah mengalami pengurangan, representasi perempuan pada tataran parlemen mengalami peningkatan, dan perempuan mengalami peningkatan secara kuantitas dalam memasuki pasar kerja, namun tingginya tingkat pendidikan masih tetap menyisakan sasaran ambigu atau timpang hampir di seluruh negara. Perempuan masih berada pada sejumlah kecil dari sisi sistem pengupahan di banyak daerah kendati mereka menempati pekerjaan lebih dari satu di sektor ekonomi informal.⁴

Perempuan sebagai sebuah kelompok sosial lebih cenderung tidak begitu kuat dalam beradaptasi terhadap ketegangan sistem sosial ekonomi yang ada. Oleh karena kesempatan terbatas atau ketimpangan struktur, banyak di antara perempuan lebih dominan menempati pekerjaan di sektor informal,⁵ bahkan mengalami kemiskinan absolut.⁶ Sebagian menjadi pedagang jalanan dan sebagian lain sebagai pemulung, pengemis, atau bahkan menjadi peminta-minta sebagaimana menerpa perempuan Minangkabau di Sumatera Barat.

¹ Bahrain Dwi Masitho, Puji Lestari, Martien Herna Susanti, "Kehidupan Sosial Ekonomi Perempuan dalam Masyarakat Nelayan di Desa Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara," *Unnes Civic Education Journal*, Vol. 2 No. 2 (2013), 33-37; Maimunah, "Ketidakadilan Gender terhadap Perempuan Lokal dalam Upaya Penanggulangan HIV/AIDS," *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol. 25 No. 23 (2012), 178; Natalie Zemon Devis, "Women's History in Transition, The European Case," *Feminist Studies*, Vol. 3 No. 3 (1976), 84.

² Mufidah CH, "Complexities in Dealing with Gender Inequality, Muslim Women and Mosque-Based Social Services in East Java Indonesia," *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 11 No. 2 (2017), 459-488; GSDRC, *Poverty and Inequality: Topic Guided* (Birmingham, UK: University of Birmingham, 2016); Groot, Shiloh Hodgetts, Darrin Nikora, Linda Leggat-Cook, Chez, "Amouri Homeless Women," *Journal Ethnography* (2011).

³ Nor Rois Ahmad, Sanggar Kanto, Edi Suslo, "Fenomena Kemiskinan dari Perspektif Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin," *Wacana*, Vol. 18 No. 4 (2015), 222.

⁴ Martha Chen, *Work, Women, and Poverty* (New York: United Nation Fund for Women, 2005), 8.

⁵ Stevy Jackson, "Why A Materialist Feminism is (Still) Possible and Necessary," *Women's Studies International Forum*, Vol. 24 No. 3/4 (2001), 283-293; Anang Haris Himawan, "Teologi Feminisme dalam Budaya Global: Telaah Kritis Figh Perempuan," *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol. 7 No. 4 (1997), 37.

⁶ M. Hajir Mutatawakkil, "Keadilan Islam dalam Persoalan Gender," *Jurnal Kalimah*, Vol. 12 No. 1 (2014), 72.

Kesempatan terbatas dan serta ketimpangan struktural terhadap perempuan bukan saja dipicu oleh sistem global akan tetapi juga terhambat oleh sistem sosio-kultural di aras lokal.

Pemahaman kultural menyangkut persoalan-persoalan perempuan, status dan perannya dalam kehidupan sosial kerap dikonstruksi secara bias. Dominasi laki-laki dalam dunia publik, kemudian melahirkan produk-produk budaya, hukum dan politik yang diinstitutionalisasi melalui lembaga-lembaga sosial, pada akhirnya membentuk semacam kesadaran semu terhadap perempuan untuk mematumhinya. Untuk kondisi ini Marx⁷ berkomentar, bahwa situasi material menentukan secara umum proses-proses sosial, politik dan intelektual. Artinya bahwa keberadaan, posisi sosial perempuan menentukan kesadaran akan peran sosialnya. Perempuan dengan suka rela menerima posisi subordinasinya bahkan cenderung melupakannya. Ketertindasan tidak dianggap persoalan. Dengan begitu, ketertindasan dianggap bukan ketertindasan, malah dianggap sebagai kodrat. Kondisi ini yang oleh Gramsci disebut dengan hegemoni.⁸

Ketertindasan yang dianggap sebagai kodrat pada dasarnya sangat mendorong kaum perempuan pada kondisi yang sangat rawan akan sosial ekonominya. Berdasarkan data yang diungkap BPS, hingga tahun 2011, terdapat sebanyak 5,90 % perempuan Indonesia mengalami rawan sosial ekonomi di daerah perkotaan dan sebanyak 12,03 % di daerah pedesaan.⁹ Itu artinya masalah kemiskinan

masih sangat rentan menerpa kaum perempuan. Pada suatu kondisi kemiskinan, beban derita yang dihadapi perempuan akan cenderung lebih besar dibanding dengan laki-laki baik secara sosial maupun secara psikologis¹⁰. Proporsi meningkatnya perempuan yang hidup dalam tingkat kemiskinan inilah yang dalam perkataan lain diistilahkan dengan feminisasi kemiskinan.

Kondisi seperti itu menjadi lebih menarik dengan mengkaji fakta yang terjadi pada masyarakat Minangkabau dengan sistem matrilineal yang dianut. Kaum perempuan sebagai orang yang ditempatkan pada posisi dominan pada praksisnya menunjukkan hal yang sangat paradoks. Kaum perempuan pada kenyataannya terpinggirkan dengan sistem sosial demikian.¹¹ Hal ini dapat dilihat pada fakta akan adanya perempuan Minangkabau menjadi pengemis.¹² Secara normatif, sistem adat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau bersifat komunal. Rasa setia kawan orang Minang melampaui ikatan darah dan wilayah kediaman mereka. Ikatan kekeluargaan tidak hanya dipahami dari satu keturunan saja melainkan harus dimaknai lebih luas lagi. Sesuai dengan sistem kehidupan bersuku kepada ibu (*matrilineal*), maka *mamak*¹³ adalah keluarga dekat yang memegang peranan

⁷ Richart Schmitt, *Introduction to Marx and Engels* (Boulder, USA: Westview Press, 1987), 14.

⁸ Welhendri Azwar, *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajau* (Yogyakarta: Galang Press, 2001), 17.

⁹ Ni Nyoman Sri Budiantari dan Surya Dewi Rustariyuni, "Pengaruh Faktor Sosial Demografi Terhadap Curahan Jam Kerja Pekerja Perempuan Pada Keluarga Miskin di Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara," *E-Jurnal EP Unud*, Vol. 2 No. 11 (2013), 539-546.

¹⁰ Kavita Alejo, "Long-Term Physical and Mental Health Effects of Domestic Violence," *Research Journal of Justice Studies and Forensic Science*, Vol. 2 No. 5 (2014), 82-98.

¹¹ Abdul Mutolib dan Yonariza, "Gender Inequality and the Oppression of Women within Minangkabau Matrilineal Society: A Case Study of the Management of Ulayat Forest Land in Nagari Bonjol, Dharmasraya District, West Sumatra Province, Indonesia," *Journal of Asian Women*, Vol. 32 No. 3 (2016), 23-49; Welhendri Azwar, *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajau*, 69-91.

¹² Muliono, *Pengemis Perempuan: Sebuah Kajian Mengenai Gender dan Sistem Sosial* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2016), 98-106; Muliono dan Welhendri Azwar, *Pengemis dan Disfungsi Sistem Sosial Kultural dalam Masyarakat Minangkabau* (Padang: Imam Bonjol, 2013), 57-73.

¹³ *Mamak* untuk panggilan kepada saudara laki-laki ibu dan *mande* untuk panggilan lain untuk ibu.

yang sangat penting. Terdapat konsep *anak dipangku kamanakan*¹⁴ *dibimbiang*. Konsep *anak dipangku* menegaskan bahwa anak atau keluarga adalah tanggung jawab yang mesti diperhatikan, sedangkan *kamanakan dibimbiang* ialah *dunsanak*¹⁵ merupakan pihak lain yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Secara filosofis, *anak dipangku kamanakan dibimbiang* juga dapat diartikan bahwa anak lebih dekat dengan *saku-saku* ayahnya, dalam artian kehidupan anak dibiayai oleh ayahnya dengan mata pencahariannya sendiri. Sedangkan *kamanakan dibimbiang* ialah kementerian tersebut masih memiliki harapan sumber penghidupan dari tanah atau harta pusaka.

Dengan diayomi pola pewarisan tersebut, secara normatif kaum perempuan adalah kaum yang memiliki aset ekonomi yang mencukupi dan mengindahkan akan posisi mereka sebagai posisi dominan dalam sistem kekeluargaan masyarakat Minangkabau. Hal ini menjadi berbanding terbaik dengan didapatinya kaum perempuan yang menggelandang di ranah Minangkabau di Sumatera Barat.

Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif-fenomenologis terhadap kemiskinan perempuan. Penelitian deskriptif dimaksudkan sebagai usaha eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial, dalam hal ini berkaitan dengan realitas sosial keterpinggiran kaum perempuan Minang di Sumatera Barat. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana konstruksi sosio-kultural masyarakat Minangkabau memosisikan perempuan dalam dinamika sosial. Lalu, bagaimana posisi ketertindasan perempuan dalam kemiskinannya. Pada konteks ini, kajian ini menjelaskan fenomena sosio kultural

¹⁴ *Kamanakan* adalah anak dari saudara perempuan dari laki-laki dalam garis matrilineal.

¹⁵ *Dunsanak*, berarti semua anggota keluarga yang bertalian adat dalam garis matrilineal.

feminisasi kemiskinan perempuan dalam kultur Matriineal Minangkabau di Sumatera Barat.

Wacana Feminisasi Kemiskinan

Konsep dasar feminisasi kemiskinan setidaknya merujuk pada dua hal utama. Pertama, mengarah pada kemiskinan yang dialami oleh kaum perempuan, baik karena sebagai tulang punggung keluarga, ataupun sebagai orang yang mencukupi kebutuhan dirinya sendiri yang secara kuantitas mayoritas dalam keadaan miskin.¹⁶ Kedua, dalam istilah yang lebih luas feminisasi kemiskinan merujuk pada keadaan dimana kaum perempuan akan menjadi jatuh miskin jika menopang hidupnya sendiri secara ekonomi.¹⁷ Dalam pengertian yang kedua ini, termasuk di dalamnya kondisi perempuan secara ekonomi bergantung pada suami, sewaktu-waktu akan mengalami kesulitan atau bahkan tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan di saat ia kehilangan suami baik karena meninggal dunia, berpisah, maupun bercerai.

Beberapa kasus perceraian, misalnya, secara signifikan menimbulkan efek yang berbeda di antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dapat saja melepas tanggung-jawab sedang perempuan dalam kenyataan cenderung mendapati dirinya pada beban yang semakin bertambah; yakni mencukupi dirinya di satu sisi dan juga harus memenuhi kebutuhan anak yang dimiliki di sisi lain. Perempuan semakin terjerat pada tanggung-jawab ganda, merawat dan membesarkan anak sekaligus berjibaku menghidupi keluarga walaupun dalam banyak

¹⁶ Diana Pearce, "The Feminization of Poverty; Women, Work, and Welfare." Dalam Moroney (ed.) *The urban and social change review; Special Issue on Women and Work*, Vol.11 No. 1 and 2 (1978), 28; Gertrude Schaffner Goldberg & Elanor Kremen, *Feminization of Poverty, Only in America?* (United States of America: Praeger Publisher, 1990), 4; Monica Townson, *A Report Card on Women and Poverty* (Ottawa: Canadian Centre for Policy Alternatives, 2000).

¹⁷ Gertrude Schaffner Goldberg and Elanor Kremen (ed.), *The feminization of Poverty; Only in America?*, 5.

hal upah yang diperoleh ketika bekerja tidaklah seimbang.

Pada sisi lain, fenomena perempuan yang berada dalam sistem sosial yang timpang pada hakikatnya bukan hanya masalah nasional negara ekonomi sedang berkembang semata, melainkan juga menjadi masalah global. Sebagaimana studi Goldberg terhadap beberapa negara maju demokrasi kapitalis dan sosialis, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Swedia, United Kingdom, Amerika Serikat, Polandia dan Uni Soviet menunjukkan masalah ketimpangan terutama kemiskinan yang terjadi baru-baru ini, di tahun 2008, kentara dengan dimensi feminis atau begitu dominan dialami oleh kaum perempuan.¹⁸ Perempuan yang hidup sendiri atau sebagai kepala rumah tangga, memiliki tingkat risiko dan ketidakberuntungan secara sosial lebih besar yang menyebabkan mereka mengalami derita kemiskinan. Keadaan kemiskinan berbasis bias gender inilah diistilahkan dengan feminisasi kemiskinan.¹⁹

Kesenjangan sosial terhadap perempuan terlihat semakin kontras seiring masuknya periode industrialisasi saat ini. Dengan adanya industrialisasi, efek yang tercipta adalah perubahan sosial kepada sistem masyarakat industri dengan beragam spesialisasi pekerjaan yang terintegrasi ke dalam sistem ekonomi global. Menurut World Development Report,²⁰ adanya integrasi ekonomi global akan memicu pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengurangi kesenjangan dan ketimpangan. Efek ganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkan

melalui integrasi ini diyakini bisa merangsang perluasan peluang kerja serta peningkatan upah yang nyata sehingga masalah-masalah sosial terutama kemiskinan dapat direduksi.

Secara esensi gagasan ini memang ada benarnya, namun *multiplier effect* yang ditimbulkan tidak jarang menyisakan dua keadaan kontradiksi seperti pisau bermata dua. Bagi kebanyakan negara berkembang dengan berbagai macam kondisi keterbelakangan beserta dinamikanya, kenyataan mengkhawatirkan integrasi ekonomi global yang menguntungkan pemilik modal menjadi sebuah malapetaka yang niscaya. Regulasi sistem dalam bentuk privatisasi dan liberalisasi pada dimensi lain justru menghambat masyarakat berkembang untuk dapat menikmati peluang yang tercipta. Bahkan, secara ekstrim dapat memerangkap mereka agar terjerebab ke dalam lembah kemiskinan secara masif termasuk secara khusus kaum perempuan. Sejak beberapa dekade belakangan seiring adanya modernisasi industrialisasi demografi perempuan mengalami peningkatan dalam memasuki pasar kerja di luar ruang domestik. Meskipun terjadi peningkatan, akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat yang diperoleh tetap terjadi ketimpangan.

Peranan sistem ekonomi global industrialisasi tidak hanya mengubah pola relasi dalam kehidupan sosial tetapi juga menciptakan kekuatan internasional baru berupa penyerapan tenaga kerja murah dengan tujuan akumulasi kapital yang tinggi dimana perempuan dalam skala luas adalah merupakan bagian dari tenaga kerja murah tersebut.²¹ Sehingga secara paradoks terdapat siklus yang berjalan di tempat; pada ruang domestik perempuan terbelenggu dengan kewajiban yang harus tunduk melayani keluarga serta hanya merawat

¹⁸ Gertrude Schaffner Goldberg (ed.), *Poor women in rich country; the feminization of poverty over the life course* (New York: Oxford University Press, 2010), 3-5.

¹⁹ Puji Laksono, "Feminisasi kemiskinan, Studi Kualitatif Pada Perempuan Miskin di Desa Kembar Kelor," *Jurnal Pendidikan, Sosiologi, dan Antropologi*, Vol. 1 No. 01 (2017), 4.

²⁰ Tadjuddin Noer Effendi, "Globalisasi dan Kemiskinan," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM*, Vol. 7 No. 2 (2003), 142.

²¹ Tadjuddin Noer Effendi, "Globalisasi dan Kemiskinan," 150; Gertrude Schaffner Goldberg & Elanor Kremen, *Feminization of Poverty, Only In America?*, 19.

anak dan di tempat kerja ia tergantung pada sistem ekonomi global sebagai tenaga kerja murah dengan upah yang rendah. Bahkan partisipasi mereka andil dalam pasar kerja secara tidak langsung juga membatasi untuk dapat menempati posisi jabatan pada tingkat yang lebih baik, walau terkadang hambatan tersebut bukan semata-mata disebabkan hal substantif tetapi lebih karena mereka adalah perempuan yang harus tunduk pada sistem sosial budaya yang melingkupinya sebagai orang nomor dua atau *second sex*.

Pemaknaan sebagai *the second sex* dalam pasar kerja, dan sistem pengupahan yang rendah pada perempuan, inilah sebagai salah satu penyebab feminisasi kemiskinan, disamping trend demografi seperti perceraian dan kepala rumah tangga perempuan. Pearce²² menekankan sekitar 60% dari keseluruhan perempuan hanya menempati tidak lebih dari sepuluh jabatan kerja yang “baik” dan secara universal hal ini masih berlanjut hingga kini. Realitas tersebut membentuk kokohnya fenomena *glass ceiling* yang begitu sukar untuk diretas. Sebagai akibatnya perempuan tidak hanya rentan menderita masalah sosial oleh karena dibatasinya kesempatan posisi kerja tetapi juga terhadap kesejahteraan ekonomi yang didapat tatkala sebagai kepala rumah tangga.

Pemiskinan Perempuan Minangkabau: Ketertindasan dalam Kemiskinannya

Persoalan feminisasi kemiskinan di Minangkabau sangat menarik untuk dicermati, sebab faktanya memang kemiskinan tampak berwajah perempuan di tengah sistem matrilineal, yang menempatkan perempuan sebagai sentra dari segala aspek kehidupan.²³

²² Diana Pearce, “The Feminization of Poverty: Women, Work, and Welfare,” *The Urban and Social Change Review: Special Issue on Women and Work*, Vol. 11. No. 1 and 2 (1978), 29.

²³ Orang Minangkabau berpandangan bahwa sistem matrilineal dipertahankan untuk memperkuat posisi dan

Secara makro, data yang pernah diungkap *United Nation*, mengisyaratkan kondisi kemiskinan paling dahsyat yang pernah terjadi di negara-negara berkembang, sekitar 1,3 milyar warga dunia yang miskin, 70% di antaranya adalah kaum perempuan. International Labour Organisation (2004) juga menambahkan sebesar 60% atau setara dengan 330 juta orang dari 550 juta pekerja miskin di dunia atau orang yang tidak mampu mencukupi diri dan keluarganya berpenghasilan US \$ 1 per hari adalah perempuan. Masyarakat Minangkabau pada kenyataan tidak dapat mengabaikan dampak dari gejala ini.²⁴ Bahkan, bentuk kemiskinan perempuan Minang bukan saja karena ada pola perubahan sistem ekonomi, melainkan terjadi seiring adanya perlakuan sosial memposisikan perempuan menjadi miskin. Perempuan miskin, tidak hanya disebabkan lemahnya dalam akses ekonomi, akan tetapi oleh sistem sosial dan diperkuat sistem adat yang keliru pada tahap penerapannya,²⁵ serta tidak mampu mengakses pendidikan yang layak²⁶.

Kaum perempuan miskin, dalam kenyataan, lebih menderita karena pada sebagian besar masyarakat perempuan menjadi objek dari nilai-nilai sosial yang membatasi mereka dalam meningkatkan kondisi ekonomi atau menikmati akses yang sama ke pelayanan umum. Di Indonesia secara umum, nilai-nilai yang diberlakukan dalam masyarakat dapat

status kaum perempuan. Perempuan dilindungi oleh sistem pewarisan matrilineal, dimana rumah dan tanah diperuntukkan bagi perempuan.

²⁴ Lihat Micheal P. Todaro and Stephen C. Smith, *Economic Development* (New York: Pearson, 2015); Rohwerder, B. *Poverty and Inequality: Topic guide* (Birmingham, UK: GSDRC, University of Birmingham, 2016), 22.

²⁵ Welhendri Azwar, “Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik,” 70-71; Yasnur Asri, “The Sketches of Minangkabau Society in Nur St. Iskandar’s and Hamka’s Novels,” *Humaniora*, Vol. 26 No. 3 (2014), 285-291.

²⁶ Nunung Nurwati, “Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan,” *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, Vol. 10 No. 1 (2008), 5-6.

berupa pernikahan di usia muda, keharusan segera memiliki anak, kehamilan berkali-kali untuk memperoleh anak laki-laki, dan jam kerja yang panjang di rumah. Menurut *Council of Foreign Relations*, Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara di dunia dengan angka absolut tertinggi pernikahan di usia anak. Indonesia adalah yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Diperkirakan satu dari lima anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mereka mencapai usia delapan belas tahun.²⁷ Di Indonesia anak perempuan merupakan korban paling rentan dari pernikahan anak sebagaimana diungkap Dewi Chandraningrum dengan merujuk pada beberapa hal: *pertama*, anak perempuan dari daerah pedesaan mengalami kerentanan dua kali lipat lebih banyak untuk menikah dibanding dari daerah perkotaan. *Kedua*, pengantin anak yang paling mungkin adalah berasal dari keluarga miskin. *Ketiga*, anak perempuan yang kurang berpendidikan dan *drop-out* dari sekolah umumnya lebih rentan menjadi pengantin-anak daripada yang bersekolah.²⁸

Dalam pernikahan kontrak di Puncak, Jawa Barat, Arivia menemukan bahwa hampir separuh anak-anak perempuan diperbudak seksual dalam akta kawin-kontrak. Jumlah ini tentu sangat mengkhawatirkan. Jawa Barat merupakan provinsi tertinggi dalam kasus AKI dan *trafficking*, dan sekaligus sebagai dua provinsi utama tempat asal perdagangan manusia di Indonesia. Sementara Kepulauan Riau dan Jakarta adalah tujuan utama dan zona transit Anak-anak yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual komersial, seperti pekerja rumah tangga, pengantin-anak, dan pekerja anak, sering dikirim untuk

bekerja di lingkungan yang berbahaya: seperti di perkebunan, sementara bayi yang diperdagangkan untuk diadopsi ilegal dan diambil organnya. Anak-anak ini berisiko ditinggalkan, diabaikan, dan diperdagangkan.²⁹ Dari penelitian Briant dan Arivia dikonfirmasi bahwa anak perempuan merupakan korban yang paling rentan dari perdagangan dan pernikahan anak. Temuan penelitian lain menunjukkan bahwa Jawa Barat menempati rangking pertama dalam korban *trafficking* menggantikan Jawa Timur sejak 2013.³⁰ Selama ini kabupaten dan kota di Jawa Barat yang menjadi pemasok terbesar perempuan pekerja migran serta pengantin-anak-perempuan untuk pernikahan anak datang dari beberapa kantong daerah seperti Indramayu, Cirebon, Bandung, Sukabumi, dan Cianjur.

Perlakuan diskriminatif terhadap perempuan juga ditandai dengan pengabaian terhadap hak-hak dasar anak perempuan yang terputus karena kawin sebelum umur 15-18 tahun akan berpotensi mempertinggi angka kematian ibu (359/100.000 kelahiran), angka kematian bayi (32/1000 kelahiran), melahirkan bayi malnutrisi (4,5 juta/tahun) yang menyebabkan “generasi hilang” bagi bangsa di masa depan. Atau memiskinkan anak perempuan dan merendharkannya karena berpotensi menjadi anak yang dilacurkan, dijadikan budak, atau pengedar narkoba dalam perdagangan manusia.³¹

²⁹ Briant, 2005 dalam Silva Leander, Annika, *Laporan Anak-anak dan Migrasi untuk UNICEF Indonesia*, 2009 dalam (Chandraningrum, 2016), 156.

³⁰ Atwar Bajari, “Women as Commodities, the Analysis of Local Culture Factor and Communication Approach of Women Trafficking in West Java, Indonesia”, *Research on Humanities and Social Science* Vol. 3 No. 5 (2013), 197.

³¹ Sulistyio Budiarto, Koentjoro, “Tradisi Luru Duit di Indramayu,” *Jurnal Ilmu Perilaku*, Vol. 1 No. 2 (2017), 125-152; Astuti Sano, “Agency dan Resilience dalam Perdagangan Seks: Gadis-gadis Remaja di Pedesaan Indramayu,” *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 1 No. 2 (2012), 107-120; Erni Sulastri dan Sofia Retnowati, “Studi Eksploratif tentang Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga di Kabupaten

²⁷ Dewi Candraningrum, “Takut akan zina, pendidikan rendah, dan kemiskinan: status anak perempuan dalam pernikahan anak di Sukabumi Jawa Barat,” *Jurnal perempuan*, Vol. 21 No. 1 (2016), 149-186.

²⁸ Dewi Candraningrum, “Takut akan zina, pendidikan rendah, dan kemiskinan,” 150.

Kasus perceraian pada masyarakat Minangkabau yang kemudian berdampak pada perempuan sebagai penanggung jawab keluarga (kepala rumah tangga) adalah merupakan fenomena yang tidak dapat ditepis perempuan Minangkabau. Hal ini bertolak dari tuntutan sistem sosial yang berlaku pada masyarakat Minangkabau dengan sistem matrilineal yang dianut. Segala urusan rumah tangga tersentralisasi kepada kaum perempuan. Sejak tahun 2003 hingga sampai tahun 2013 tingkat perceraian terhadap masyarakat Minangkabau di Kota Padang saja, misalnya, mengalami peningkatan, yakni dari mulai 687 (2003) mencapai 1.035 (2013). Hal yang melatari adalah perselisihan sebanyak 302 orang dan meninggalkan kewajiban sebanyak 465 orang.³² Konsekuensi dari ini, perempuan cenderung menjadi kepala rumah tangga yang mengurus anak dan keluarga karena secara emosional anak lebih dekat dengan ibu, sesuai dengan sistem sosial yang berlaku.

Setidaknya terdapat tiga akar utama mengapa kemiskinan itu berwajah perempuan, yaitu ketika ia berada dalam ruang privat keluarga, adanya nilai tentang pembagian kerja secara seksual, dan globalisasi (sistem sosial yang lebih luas). Berhadapan dengan laki-laki, perempuan berada dalam posisi dan relasi yang lemah. Akses perempuan pada sumber keuangan dalam keluarga sangat tidak menguntungkan. Kenyataan seperti ini dipengaruhi oleh sistem sosial-budaya yang paternalistik. Dampak dari sistem ini adalah lahirnya produk-produk hukum yang bias gender yang cenderung lebih merugikan perempuan. Sistem nilai, norma dan beberapa stereotipe, atas dasar legitimasi politis, budaya, dan agama, yang dilekatkan

Indramayu Jawa Barat,” *Psikologika*, Vol. 8 No. 16 (2003), 30-40; Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Profil Hasil Pendataan Keluarga* (Jakarta: Direktorat Pelaporan dan Statistik, 2015), 7.

³² Badan Pusat Statistik Kota Padang, *Padang in Figure* (Padang: BPS, 2014), 65.

pada perempuan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi posisi serta hubungan perempuan dengan laki-laki dalam struktur sosial dan rumah tangga.

Sistem nilai atau norma yang merupakan sebuah konsensus dan dikonstruksi oleh masyarakat itu sendiri, yang kemudian secara turun temurun dianut oleh masing-masing warga. Lahirnya konstruksi sosial tentang status dan peran perempuan ini merupakan buah dari cara pandang suatu komunitas masyarakat terhadap adanya perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Cara pandang yang kemudian melahirkan penindasan, eksploitasi dan pensubordinasian perempuan dalam hubungan-hubungan sosial, yang secara kontekstual sangat terkait dengan kondisi siso-kultural saat itu.

Laki-laki dan perempuan secara alamiah, biologis dan genetis berbeda, adalah sebuah kenyataan, sebagai kodrat Tuhan yang tidak dapat diubah. Akan tetapi yang kemudian melahirkan perdebatan adalah ketika perbedaan secara *natur* ini lalu kemudian menimbulkan pemahaman yang beragam pada masing-masing orang dan kelompok masyarakat.³³ Perbedaan pemahaman ini selanjutnya dikenal dengan konsep *gender*, yaitu beberapa sifat yang dilekatkan pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural.³⁴ Misalnya, stereotipe perempuan yang dikenal dengan lemah lembut, keibuan, emosional atau lebih sabar. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, perkasa dan sebagainya. Stereotipe-stereotipe ini dapat dipertukarkan dan bisa jadi berbeda pada masing-masing masyarakat, tergantung pada budaya dan sistem nilai yang dibangun.

Pada prinsipnya adanya perbedaan gender

³³ Welhendri Azwar, “Matriokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuk,” 8.

³⁴ Mansoer Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 8.

(*gender differences*), yang selanjutnya melahirkan peran gender (*gender role*) yang didasarkan atas perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, sesungguhnya tidaklah menjadi masalah dan oleh karena itu tidak perlu digugat. Jikalau secara kodrati kaum perempuan dengan organ reproduksinya bisa hamil, melahirkan dan menyusui, lalu kemudian memiliki peran gender sebagai pera-wat, pengasuh dan pendidik, adalah persoalan *nature*, alamiah. Persoalannya adalah, ternyata peran gender perempuan dinilai dan dihargai jauh lebih rendah dibanding peran gender laki-laki. Peran gender ternyata melahirkan ketidakadilan, pendiskriminasian dan penindasan terhadap kaum perempuan. Ini pada dasarnya adalah sebuah *socially constructed*, sebuah *image* yang dibangun oleh komunitas tertentu, sebagai telah dijelaskan, melalui proses sosial yang amat panjang yang disosialisasikan bahkan diperkuat melalui legitimasi nilai-nilai budaya dan agama.³⁵

Ketertindasan perempuan, secara antropologis, dipandang oleh Sherry Ortner³⁶ disebabkan oleh sebuah sistem nilai yang diberi makna tertentu secara kultural. Dia menempatkan bahwa keterpinggiran perempuan pada tataran ideologi dan simbol kebudayaan. Menurut Ortner,³⁷ ketertindasan perempuan dalam budaya universal merupakan manivestasi dari pemahaman antara budaya dan alam, yang kemudian dibandingkan dengan posisi laki-laki dan perempuan pada peran sosialnya. Secara umum, kebudayaan memberi pembedaan antara masyarakat manusia dan alam. Kebudayaan berupaya mengendalikan dan menguasai alam, yang selanjutnya dimanfaatkan untuk berbagai

kepentingan. Untuk itu kebudayaan berada pada posisi superior dan alam di pihak inferior. Kebudayaan diciptakan untuk menguasai, mengelola dan mengendalikan alam untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan masyarakat. Terkait dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan, maka perempuan selalu diasosiasikan dengan alam, sedangkan laki-laki diasosiasikan dengan kebudayaan. Oleh karenanya merupakan suatu hal yang alami jika perempuan berada posisi yang dikontrol, dikendalikan dan dikuasai.

Untuk pandangan ini Ortner mengemukakan argumentasi bahwa secara biologis dengan fungsi reproduksinya yang khas membuat perempuan tampak lebih dekat dengan alam.³⁸ Daya kreativitas perempuan secara alami terpenuhi melalui proses melahirkan. Sementara laki-laki lebih dihubungkan dengan kebudayaan dan dengan daya cipta, kreativitas yang diberikan kebudayaan. Oleh karenanya laki-laki dipaksa dan bebas untuk menciptakan secara artifisial melalui sarana kebudayaan, dan digunakan untuk mempertahankan kebudayaan itu sendiri. Kedua, disebabkan oleh kegiatan reproduksinya, seperti hamil, melahirkan, menyusui, cenderung membatasi perempuan untuk berperan pada fungsi-fungsi sosial tertentu.

Konsekuensinya, perempuan identik dengan aktivitas-aktivitas di wilayah domestik, seperti mengasuh dan mendidik anak. Celaknya kegiatan-kegiatan seperti ini dianggap sebagai tugas pokok perempuan, yang secara praktis memposisikan laki-laki pada tugas-tugas di wilayah publik. Inilah yang menjadi sebab timbulnya distingsi tugas-tugas domestik dan publik antara laki-laki dan perempuan. Ketidak-adilannya adalah ketika pekerjaan-pekerjaan domestik dinilai lebih rendah dari tugas-tugas di bidang publik.

³⁵ Welhendri, Azwar, "Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuk," 10.

³⁶ Henrietta L. Moore, *Feminisme & Antropologi* (Jakarta: Obor, 1998), 30.

³⁷ Henrietta L. Moore, *Feminisme & Antropologi*, 31.

³⁸ Henrietta Lmoore, *Feminisme & Antropologi*, 31-32.

Domestikasi ini juga semakin menjadi kronis, ketika perempuan harus menjadi kepala rumah tangga dan atau harus mencukupi kebutuhan dirinya sendiri sebagaimana telah disinggung di atas pada masyarakat Minangkabau. Di tengah kondisi pendidikan yang rendah dan sistem sosial yang mengitari mereka sebagai perempuan, akses ke ruang publik yang tidak mudah, mengemis menjadi pilihan bagi perempuan Minang sebab dipandang sebagai jalan yang lebih mudah, praktis, intans, dan sederhana untuk diraih.

“Untuk apa lagi pulang ke kampung, tidak ada yang bisa diharapkan, apa yang akan saya makan, sementara sayasudah tua. Sawah ada, luas, tapi sulit, saya tidak ada sama sekali diberi bagian hasil sawah semenjak enam tahun lalu, apa yang akan sayakerjakan lagi, badan sudah tidak kuat. Seperti ini (menegemis) sayabisa dapat makan, membayar biaya mencuci baju, memberi uang jajan kepada anak saudara di rumah yang saya tinggal bersamanya. Saya tidak pernah pulang kampung lagi, sejak suami saya meninggal, sebab tidak ada lagi yang mengurus saya di sana”.³⁹

Jika idealnya, di ranah Minang, tanah pusaka yang tersentra kepada perempuan berfungsi sebagai perekat tali kekerabatan, pada praksisnya keberadaan tanah warisan menjadi sumber masalah yang memecah belah sistem kebersamaan kaum kerabat mereka sebagaimana yang dialami perempuan Minang yang menjadi pengemis, dimana mereka memiliki kesamaan nasib mengenai harta pusaka. Mereka memilih kehidupan menjadi pengemis karena tidak ada yang dapat diharapkan dari harta pusaka yang dimiliki

kaumnya dikarenakan besarnya keinginan dari masing-masing kerabatnya untuk memiliki pusaka yang ada. Sehingga akhirnya kestabilan kehidupan sosial kaum para pengemis ini bergantung pada adanya tekanan antara satu dengan yang lain. Keterpinggiran ini menyebabkan mereka menjadi gelandangan di kampung sendiri.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, kenapa perempuan dengan mudah dan mau dieksploitasi? Kenapa masih banyak, walau sekarang bermunculan berbagai gerakan protes dan perlawanan, perempuan yang mau menerima bahkan cenderung mempertahankan sistem yang nyata-nyata menindas mereka. Antonio Gramsci⁴⁰ menjelaskan, bahwa supremasi suatu kelas sosial diperoleh dengan dua cara, yaitu melalui dominasi atau paksaan (*coercion*), dan yang kedua melalui kepemimpinan intelektual dan moral.

Berangkat dari dasar pemikiran ini, keterpinggiran perempuan dapat dijelaskan. Pertama, ketika pembagian kerja semakin menajam antara wilayah publik dan domestik, laki-laki semakin mendo-minasi dan menguasai aset-aset ekonomi dan perempuan semakin terkurung dalam kehidupan rumah tangga. Akhirnya perempuan semakin tergantung secara ekonomis kepada laki-laki. Laki-laki menjadi pemimpin keluarga, yang dibalikinya tersembunyi sebuah kepentingan untuk mengontrol dan menguasai aset ekonomi yang mereka perjuangkan. Pola kepemimpinan keluarga selanjutnya termanivestasi dalam kehidupan sosial, dimana laki-laki selalu dominan dalam berbagai aspek kehidupan, politik, budaya dan hukum. Pada saat inilah ideologi patriarki dominan dan menindas, sehingga lahir produk politik, sistem nilai, sistem hukum yang berpihak pada kepen-

³⁹ Wawancara dengan salah seorang perempuan Minang yang berprofesi sebagai pengemis di Kota Padang, yang menggambarkan betapa sistem pewarisan matrilineal Minangkabau, pada tingkat implementasinya tidak meningkatkan martabat perempuan.

⁴⁰ Nezar Patria dan Andi Arief, *Antonio Gramsci, Negara dan Hegemoni* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 119.

tingan laki-laki. Dibangunnya sistem nilai yang memposisikan laki-laki sebagai kepala rumah tangga, sementara perempuan sebagai pengurus rumah tangga, adalah sebuah contoh. Sistem ini nyata-nyata memaksa perempuan menjadi pelayan laki-laki.

Kedua, dominasi laki-laki dalam dunia publik, kemudian melahirkan produk-produk budaya, hukum dan politik yang diinstitutionalisasi melalui lembaga-lembaga sosial, yang akhirnya membentuk kesadaran semu perempuan untuk mematuhi. Untuk kondisi ini Marx⁴¹ berkomentar, bahwa situasi material menentukan secara umum proses-proses sosial, politik dan intelektual. Artinya bahwa keberadaan, posisi sosial perempuan menentukan kesadaran akan peran sosialnya. Perempuan dengan suka rela menerima posisi subordinasinya bahkan cenderung melupakannya. Ketertindasan tidak dianggap persoalan. Dengan begitu, ketertindasan dianggap bukan ketertindasan, malah dianggap sebagai kodrat. Kondisi ini yang oleh Gramsci disebut dengan hegemoni.

Hegemoni dijelaskan oleh Gramsci⁴² sebagai kondisi supremasi yang diperoleh melalui kepemimpinan intelektual dan moral. Menurut Gramsci hegemoni merupakan rantai kemenangan yang diperoleh melalui mekanisme konsensus yang menumbuhkan kesadaran melalui institusi-institusi yang ada dalam masyarakat. Ideologi patriarki merupakan sistem yang mengejawantah melalui institusi-institusi sosial, politik dan ekonomi. Sistem yang dibangun untuk kepentingan laki-laki, dan oleh karenanya merupakan basis dari opresi perempuan.

Sebagai sebuah komunitas kecil, lembaga keluarga dipandang sebagai institusi yang paling patriarkal. Dalam lembaga keluarga ditemui

sistem hirarki, dimana laki-laki diposisikan lebih tinggi dan berkuasa, sementara perempuan lebih rendah dan untuk itu dikuasai. Keluarga merupakan lembaga penting untuk mendidik dan mentransformasikan nilai-nilai patriarki. Dalam keluarga individu memperoleh pelajaran tentang hirarki, subordinasi dan diskriminasi. Dimana anak laki-laki belajar memaksa dan berkuasa, sebaliknya perempuan belajar mematuhi, belajar diperlakukan tidak sederajat dan belajar mensosialisasikan diri sebagai manusia yang terpinggirkan. Malah keterpenjaraan dalam lingkaran aktivitas rumah tangga digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kebahagiaan oleh perempuan.

Dalam perjalanan historisnya yang panjang, hegemonisasi ideologi patriarki ternyata berhasil membangun kesadaran etika perempuan dalam memposisikan peran sosialnya. Di Indonesia misalnya, dari hasil penelitian ada kecenderungan bahwa tidak ada korelasi antara kebahagiaan isteri dengan partisipasi suami dalam membantu pekerjaan rumah tangga, terutama pada keluarga Jawa. Bahkan pada keluarga suku Minahasa, korelasinya cenderung negatif, dimana semakin tinggi tingkat partisipasi suami dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, semakin rendah tingkat kebahagiaan isteri. Hidred Geertz dan Koentjaraningrat⁴³ menemukan, bahwa pada keluarga Jawa suami diharapkan untuk menangani urusan-urusan diluar rumah tangga. Pengabdian isteri pada suami bagi masyarakat Jawa dipandang sebagai sesuatu yang sakral. Bahkan dianggap sebagai kebahagiaan ketika isteri dapat mengabdikan diri dan hidupnya pada suami. Pengabdian isteri dianggap sebagai sumber kebahagiaan dalam perkawinan.

Realitas ini sesungguhnya secara moral

⁴¹ Richard Schmitt, *Introduction to Marx and Engels*, 14.

⁴² Nezar Patria dan Andi Arief, *Antonio Gramsci, Negara dan Hegemoni*, 199.

⁴³ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda, Sudut Pandang baru Tentang Relasi Gender* (Bandung: Mizan, 1999), 41.

menunjukkan bahwa laki-laki menguasai dan mengontrol perempuan. Bagi Foreman,⁴⁴ perempuan pada kondisi ini berada pada posisi teralienasi, oleh karena seluruh aktivitas hidupnya hanya merupakan kelengkapan bagi orang lain. Sebelum menikah perempuan lebih banyak diatur oleh orang tuanya dan ketika menikah diserahkan orang tuanya pada suaminya. Perempuan lalu kemudian menjadi milik suaminya, mengurus suami, rumah tangganya, dan ketika ia menjadi seorang ibu, iapun menjadi pelayan anaknya. Perempuan menjadi teralienasi, menurut Foreman, oleh karena hidupnya senantiasa di-peruntukkan untuk kepentingan orang lain, menjadi bagian dari orang lain, sehingga ia kehilangan jati dirinya.

Apa yang dipahami, dialami ataupun yang menjadi kesadaran moral perempuan tentang status dan peran sosialnya, senyatanya merupakan konstruksi sosial dari sistem nilai, norma dan etika sosial. Bangunan ini selanjutnya menjadi sebuah ideologi dalam proses interaksi, dan ditransformasikan dari generasi ke generasi melalui lembaga-lembaga sosial yang ada, lembaga keluarga misalnya. Sehingga semenjak kecil anak-anak sudah dibebani aturan normatif, mana yang pantas dilakukan laki-laki dan mana yang pantas dilakukan perempuan. Aturan normatif ini secara perlahan membentuk sikap, watak individu dalam memerankan peran sosialnya. Hal ini menunjukkan bahwa ideologi patriarki akan memperpanjang hegemoninya terhadap perempuan. Kedudukan perempuan semakin permanen sebagai “*kanca wingking*”, teman laki-laki digaris belakang dan orang yang dibebani kewajiban mengurus rumah tangga. Oleh karenanya haknya sebagai makhluk sosial dipasung.

⁴⁴ Anne Foreman, *Femininity as Alienation: Women and The Family in Marxism and Psychoanalysis* (London: Pluto Press, 1997), 65.

Melawan Kodrat: Perjuangan Perempuan Minang dalam Kemiskinan

Perempuan Minangkabau berdasarkan nilai kultural menempati posisi yang begitu baik. Perempuan dicitrakan sebagai sosok makhluk istimewa sehingga harus selalu dijaga dan dimuliakan⁴⁵. Di Indonesia secara umum sebagaimana dalam kultur Sunda misalnya, interpretasi kultural atas perempuan terpusat pada revitalisasi sosok citra seorang *dewi*, *ratu*, *bidadari*, *endang*, ataupun *bumi*,⁴⁶ dan konsep *ambu*, *Nyi Pohaci* dan *pikukuh* pada masyarakat Baduy di Kenekes Banten.⁴⁷ Begitupun di Lombok, karena citranya yang begitu apik, perempuan teramat mahal untuk ‘dipinang’ oleh laki-laki sehingga untuk memperlakukan dan memposisikan perempuan tidak sembarangan.⁴⁸ Pada masyarakat Minangkabau, perempuan adalah merupakan tempat dimana kehormatan itu disandangkan. Dalam struktur keluarga matrilineal Minangkabau, perempuan menduduki posisi sentral dan penting. Dalam terminologi Minangkabau, perempuan disebut sebagai *bundo kanduang*, sebuah sebutan yang menunjuk pada sifat-sifat keibuan yang mempunyai wawasan kepemimpinan, karena pada dasarnya dia adalah pengantara keturunan. Ia adalah sentral pembentukan pola pikir dan watak manusia dalam melanjutkan kelangsungan sebuah generasi.

Dalam falsafah adat Minangkabau *bundo kanduang* merupakan tonggak rumah tangga

⁴⁵ Welhendri Azwar, *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuk*, 69-70.

⁴⁶ Jajang A. Rohmana, “Perempuan dan Kearifan Lokal: Pervormativitas Perempuan dalam Ritual Adat Sunda,” *Musawa*, Vol. 13 No. 2 (2014), 153; Ajip Rosidi, *Ensiklopedi Sunda: Alam, Manusia dan Budaya* (Jakarta: Pustaka Jaya, 2001), 620.

⁴⁷ R. Cecep Permana, *Kesetaraan Gender dalam Adat Inti Jagat Baduy* (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2001), 19.

⁴⁸ Ahmad Fathan Aniq, “Konflik Peran Gender pada Tradisi Merarik di Pulau Lombok,” *Conference Proceedings AICIS XII*. Surabaya, 5-8 November 2012, 2321-2339; Maria Platt, “Sudah Telanjur: Perempuan dan Transisi ke Perkawinan di Lombok,” *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 1 No. 2 (2012), 65-178.

dan tiang *nagari*.⁴⁹ Di tangannya bergantung baik buruknya arah kehidupan sebuah rumah tangga dan masyarakat secara umum. Dengan begitu *bundo kanduang* memiliki fungsi sosial sebagai pen-didik utama budi pekerti luhur.

Sosok *bundo kanduang* ini digambarkan dalam pepatah:

Bundo kanduang
Limpapeh rumah nan gadang
Sumarak dalam nagari
Hiyasan dalam kampuang
Umbun puro pagangan kunci

Ada dua hal yang bisa ditangkap dari penuturan pepatah di atas. Pertama, bahwa perempuan Minangkabau berperan dalam mempertahankan garis keturunan karena sistem matrilinealnya dan sebagai pemelihara harta pusaka dengan kepemilikan komunal dalam sistem pewarisan. Kedua, aspek kefemininan merupakan kriteria yang sangat penting dalam menilai sosok perempuan Minangkabau.⁵⁰ Artinya secara struktural perempuan mempunyai kedudukan yang sangat sentral dan fundamental dalam sistem sosial.

Namun kodrat istimewa ini pada praksisnya semakin tercerabut terutama dalam ihwal kemiskinan yang dialami.⁵¹ Ia tidak hanya harus melucuti kodrat kulturalnya untuk kelangsungan hidup berkeluarga, tetapi juga mesti berjuang meretas belenggu kemiskinan.

⁴⁹ Nagari adalah unit pemerintah terendah di Sumatera Barat dan merupakan kelompok masyarakat Minangkabau yang hidup berdasarkan aturan adat dengan hak adat mereka seperti hak Ulayat, hak sejarah asal Minangkabau yang lebih tua dari Sumatera. Keunikan Nagari bukan hanya dari aspek historis tetapi juga dari kekayaan budaya. Ini memperkuat Nagari sebagai inti dari Minangkabau. Lihat Welhendri Azwar, Yulizal Yunus, Muliono, dan Yuli Permatasari, "Nagari Minangkabau: The Study of Indigenous Institutions in West Sumatra, Indonesia," *Jurnal Bina Praja*, Vol. 10 No. 2 (2018), 231.

⁵⁰ Welhendri Azwar, *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Batauk*, 70.

⁵¹ Iva Ariani, "Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan Di Indonesia)," *Jurnal Filsafat*, Vol. 25 No. 1 (2015), 32-55.

Tidak jarang kaum perempuan, karena keterbatasan akses yang dimiliki, merendahkan martabatnya untuk tetap bertahan menjadi pengemis dan gelandangan. Pilihan menjadi pengemis bukan tanpa alasan yang tidak berarti. Sesuai dengan sistem matrilineal yang dianut, anak dan kerabat cenderung tertumpu kepada perempuan sebagai sentra dari sistem matrilineal.

Bagaimana *mungkin* kami melarang ibu mengemis. Saya dan suami saya masih tanggungan ibu, begitu juga abang dan adik-adik saya. Banyak yang ditanggung ibu, termasuk sebagian keluarga ibu yang tinggal di sebelah mushalla itu. Kakak saya yang tinggal di rumah sebelah begitu juga, oleh kerananya tidak mungkin kami bisa melarang ibu, dengan apa kami akan hidup.⁵²

Perjuangan meretas kenyataan mereka sebagai perempuandan sekaligus sebagai ibu rumah tangga membuat kaum perempuan pengemis ini melawan kodratnya sebagai perempuan Minang yang berbudaya dan syarat akan nilai. Sebagaimana dinyatakan Ijus:

Saya berdiri di sini mendapat hasil 100 ribu. Alhamdulillah sedikit lumayan, bisa membeli beras untuk makan saya dan anak-anak.

Untuk cucu saya ini, belum ada biaya untuk membawanya ke rumah sakit, sudah pernah dibawa ke rumah sakit tapi uang tidak mencukupi, mahal membayar uang operasi sehingga tidak ada diobatkan lagi sampai sekarang ini. bagaimana mungkin mengobatkannya uang kami tidak ada untuk makan saja sudah susah seperti ini, semua anak bergantung kepada saya, tidak ada perasaannya, anak dan suaminya menjadi tanggungan *amak* sendiri.⁵³

⁵² Wawancara dengan anak salah seorang pengemis perempuan, yang kehidupan keluarganya masih bergantung pada ibunya.

⁵³ Wawancara dengan pengemis perempuan yang berjuang melawan kodratnya sebagai "perempuan Minang". Berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Bahkan,

Mengemis di jalanan dapat dikatakan sebagai strategi bertahan dan sekaligus melanjutkan proses kehidupan mereka. Hal ini menjadi pilihan dilatari oleh kenyataan pendidikan perempuan pengemis yang tidak memadai dan sekaligus adanya tuntutan sistem sosial yang begitu keras. Ada semacam “atap kaca” yang tak bisa pecah dalam sistem sosial yang terjalin. Sifat dan tingkat diskriminasi senantiasa bermetamorfosa dan bervariasi di berbagai kondisi ruang dan waktu. Tidak tampak di mana perempuan telah menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial dan ekonomi. Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik terjadi di berbagai dimensi sosial. Perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi⁵⁴, namun pada dasarnya ketidaksetaraan itu sebenarnya merugikan semua orang.

Lagi-lagi, produk sistem sosial kultural menjadi determinan, membentuk distingsi kerja antara wilayah domestik dan publik yang mengkonstruksi kepantasan pekerjaan perempuan dan laki-laki. Laki-laki dinilai wajar dan seharusnya eksis dalam dunia sosial, bisnis, industri dan juga dalam kehidupan keluarga. Sementara perempuan hanya semakin terkurung dalam sangkar emas keluarga sebab yang pantas baginya adalah ruang domestik. Perempuan lebih pantas menjadi pelayan laki-laki dalam rumah tangga sehingga ia tersingkirkan dari semua partisipasi di bidang produksi dan sosial.

Ketidakberdayaan perempuan untuk menghantam dominasi laki-laki dikompensasi dengan membangun jargon-jargon tertentu

sebagai penghibur diri. Ambil sebuah contoh, jargon perempuan adalah makhluk mulia, perempuan sebagai tiang negara, mendidik, mengasuh dan merawat anak, termasuk mengurus suami adalah pekerjaan termulia bagi perempuan, dan sebagainya. Jargon-jargon ini dikonstruksi, selain untuk menghibur perempuan, bisa jadi bertujuan untuk meredam perlawanan perempuan terhadap sistem dan untuk menjaga keamanan.

Sayangnya perempuan tidak menyadari bahwa pujian, sanjungan yang diberikan kepada mereka sebenarnya adalah sebuah penjara yang mengkerangkeng aktivitas dan kreatifitas serta membatasi hak-hak sosial mereka. Bangunan sistem yang memenjarakan perempuan ini diinstitutionalisasi melalui norma-norma sosial dan sistem nilai yang membentuk kultur tertentu. Kultur yang mampu mempengaruhi sikap, cara pandang dan penerimaan seseorang terhadap sistem sosial yang ada. Tambah lagi ketika penjara emas itu dikunci dengan legitimasi agama, dengan interpretasi-interpretasi yang keliru dan sempit.

Namun apa yang menarik ialah, bahwa dalam struktur hegemonik dan diskriminasi sekalipun, pada hakikatnya mereka sebagai perempuan tetap melakukan pilihan-pilihan bagi hidupnya. Mereka bukan pihak yang menerima begitu saja atas kenyataan hidup yang dialami dan dijalani. Meskipun, terdapat suatu kenyataan dimana perempuan selalu di bawah dominasi laki-laki. Baik yang sakral maupun yang tidak sejarah manusia senantiasa menunjukkan diri sebagai sejarah laki-laki. Perempuan tetap melalui proses dalam sistem sosial yang berlangsung dalam masyarakat kendati ketidaksetaraan itu tetap berkelindan.

Perjuangan perempuan meretas kemiskinan menjadi berat karena ia harus melalui dua belenggu; pertama ia melawan konstruksi sosial yang bersifat paternalistik, dan kedua

untuk anaknya yang sudah berkeluarga (bersuami), sampai pada kebutuhan cucunya, yang semestinya tidak lagi menjadi tanggungannya.

⁵⁴ Kavita Alejo, “Long-Term Physical and Mental Health Effects of Domestic Violence,” 82-98.

melawan kemiskinan yang ia sudah sedang terjerebab di dalamnya. Di sinilah institusi masyarakat seperti norma sosial, adat istiadat, hak dan hukum sebagaimana halnya institusi ekonomi, seperti pasar, secara kontras telah membentuk peran dan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Institusi-institusi tersebut mempengaruhi jenis sumber daya yang dapat diakses oleh perempuan, jenis aktifitas yang boleh atau tidak boleh mereka lakukan, dan dalam bentuk apa mereka dapat berpartisipasi dalam ekonomi dan masyarakat. Institusi tersebut mewujudkan insentif yang dapat mendorong ataupun mengekang. Bahkan ketika institusi formal dan informal tidak secara eksplisit membedakan laki-laki dan perempuan, mereka umumnya dibentuk (baik secara eksplisit maupun implisit) oleh norma sosial yang berkaitan dengan peran yang sepatasnya bagi masing-masing gender.

Institusi masyarakat seperti ini biasanya tidak mudah untuk diubah sebab senantiasa beroperasi setiap saat dalam membentuk hubungan gender sejak dini dan dalam mewariskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Seseorang membuat banyak keputusan yang paling mendasar dalam hidupnya di dalam lingkup rumah tangga seperti menentukan tempat bekerja, tugas dan sumber daya produktif dialokasikan di antara laki-laki dan perempuan, seberapa banyak kebebasan yang diberikan kepada mereka, apakah ada perbedaan harapan atau ekspektasi di antara mereka. Semua ini menciptakan, memperkuat ketidaksetaraan gender. Tetapi rumah tangga tidak mengambil keputusan sendirian. Mereka membuat keputusan dalam konteks komunitas dan melalui cara-cara yang mencerminkan pengaruh insentif yang ditegakkan oleh institusi dan lingkungan yang lebih luas.

Simpulan

Masyarakat Minangkabau, yang menganut sistem matrilineal, menempatkan perempuan sebagai posisi sentral dan terhormat, serta kuat secara ekonomi. Kekuatan ekonomi itu terdapat pada sistem pewarisan matrilineal, dimana seluruh harta pusaka adat diwariskan kepada perempuan. Disamping dukungan ekonomi dari keluarga inti. Ini yang kemudian distilahkan dengan *doube power of economic*. Namun di sisi lain, menjadi paradoks, ketika masih ditemukannya perempuan Minang yang melakukan aktivitas mengemis sebagai profesi di Sumatera Barat.

Realitas ini memperlihatkan adanya kekeliruan dalam mempraktekkan sistem adat yang sangat sensitif gender ini. Sistem matrilineal-matrilokal Minangkabau yang semestinya bersifat matriarkhat, dalam prakteknya bersifat patriarkhat. Dimana hasrat dominasi laki-laki untuk berkuasa dan mengendalikan sistem sosial, menjadikan perempuan pada posisi inferior. Dan, fenomena pengemis perempuan Minang di Sumatera Barat, merupakan kritik terhadap pelaksanaan sistem adat Minangkabau yang disimpangkan, yang akhirnya dimaknai sebagai sebuah kebenaran kultural.

Maka menjadi penting, berdasarkan penelitian ini, untuk melakukan redefinisi dan reaktualisasi sistem adat dalam prakteknya, *mambaliak an siriah ka gagang, pinang ka tampuak*. Upaya yang sungguh-sungguh untuk mengembalikan bahwa ungkapan *bondo kanduang, limpapeh rumah nan gadang* tidak hanya sekedar slogan. Tapi merupakan sistem nilai yang mengatur segala tindakan masyarakat Minangkabau dalam mengaktualisasikan sistem adatnya. Sistem adat yang menghormati matrilineal perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Nor Rois., Sanggar Kanto, dan Edi Susilo. "Fenomena Kemiskinan dari Perspektif Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin." *Wacana*, Vol. 18 No. 4 (2015): 221-230.
- Alejo, Kavita. "Long-Term Physical and Mental Health Effects of Domestic Violence." *Research Journal of Justice Studies and Forensic Science*, Vol. 2 No. 5 (2014): 82-98.
- Aniq, Ahmad Fathan. "Konflik Peran Gender pada Tradisi Merarik di Pulau Lombok." *Conference Proceedings AICIS XII*. Surabaya, 5-8 (November 2012), 2321-2339.
- Ariani, Iva. "Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan Di Indonesia)." *Jurnal Filsafat*, Vol. 25 No. 1 (2015): 32-55.
- Arivia, Gadis dan Abby Gina. "Budaya, Seks dan Agama: Kajian Kawin Kontrak di Cisarua & Jakarta." *Jurnal Perempuan*, Vol. 20 No. 1 (2015).
- Asri, Yasnur. "The Sketches of Minangkabau Society in Nur St. Iskandar's and Hamka's Novels." *Humaniora*, Vol. 26 No. 3 (2014): 285-29.
- Azwar, Welhendri. *Matrilokal dan Status Perempuan Dalam Tradisi Bajapuik*. Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Azwar, Welhendri. "Women in The Kerangkeng of Tradition: the Study on the Status of Women in Minangkabau." *Ijtima'iyya*, Vol. 10 No. 2 (2018): 369-385.
- Azwar, Welhendri., Yulizal Yunus, Muliono, dan Yuli Permatasari. "Nagari Minangkabau: The Study of Indigenous Institutions in West Sumatra, Indonesia." *Jurnal Bina Praja*, Vol. 10 No. 2 (2018): 231-239.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. *Profil Hasil Pendataan Keluarga*. Jakarta: Direktorat Pelaporan dan Statistik, 2015.
- Badan Pusat Statistik Kota Padang. *Padang in Figure*. Padang: BPS, 2014.
- Bajari, Atwar. "Women as Commodities, the Analysis of Local Culture Factor and Communication Approach of Women Trafficking in West Java, Indonesia." *Research on Humanities and Social Science*, Vol. 3, No. 5 (2013): 193-200.
- Budiantari, Ni Nyoman Sri dan Surya Dewi Rustariyuni. "Pengaruh Faktor Sosial Demografi Terhadap Curahan Jam Kerja Pekerja Perempuan Pada Keluarga Miskin di Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara." *E-Jurnal EP Unud*, Vol. 2 No. 11 (2013): 539-546.
- Budiarto, Sulistyio dan Koentjoro. "Tradisi Luru Duit di Indramayu." *Jurnal Ilmu Perilaku*, Vol. 1 No. 2 (2017) : 125-152.
- Candraningrum, Dewi. "Takut Akan Zina, Pendidikan Rendah, dan Kemiskinan : Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat." *Jurnal perempuan*. Vol. 21 No. 1 (2016): 149-186.
- Chen, Martha. *Work, Women, and Poverty*. New York: United Nation Fund for Women (UNIFEM), 2005.
- Denzim, N.K dan Yvonna Sessions Lincoln. *Handbook of Qualitative Reseachr*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Devis, Natalie Zemon. "Women's Hotory in Transition, The European Case." *Feminist Studies*, Vol. 3 No. 3 (1976): 83-103.
- Effendi, Tadjuddin Noer. "Peran Perempuan dalam Pembangunan", Katjasungkana, Nursyahbandi. *Potret perempuan; tinjauan politik, ekonomi, hukum di zaman orde baru*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UMY, 2001.

- Effendi, Tadjuddin Noer. "Globalisasi dan Kemiskinan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 7 No. 2. (2003): 141-159.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Foreman, Anne. *Femininity as Alienation: women and the family in Marxism and psychoanalysis*. London: Pluto Press, 1997.
- Goldberg, Gertrude Schaffner (ed). *Poor Women in Rich Country: The Feminization of Poverty Over the Life Course*. New York: Oxford University Press, 2010.
- Goldberg, Gertrude Schaffner dan Elanor Kremen (ed). *The feminization of poverty, only in America?*. United States of America: Praeger Publisher, 1990.
- Groot, Shiloh Hodgetts, Darrin Nikora, Linda Leggat-Cook, dan Chez. "Amouri Homeless Women." *Journal Ethnography* (2011).
- GSDRC. *Poverty and Inequality: Topic*. Birmingham: University of Birmingham, 2016.
- Hakimy, Idrus. *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997.
- Himawan, Anang Haris. "Teologi Feminisme dalam Budaya Global: Telaah Kritis Figh Perempuan." *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol. 7 No. 4 (1997): 35-42.
- Jackson, Stevy. "Why A Materialist Feminism is (Still) Possible and Necessary." *Women's Studies International Forum*, Vol. 24 No. 3/4 (2001): 283-293.
- Koentjaraningrat. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1985.
- Laksono, Puji. "Feminisasi kemiskinan, Studi Kualitatif Pada Perempuan Miskin di Desa Kembar Kelor." *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, dan Antropologi*, Vol. 1 No. 01 (2017): 1-15.
- Maimunah. "Ketidakadilan Gender terhadap Perempuan Lokal dalam Upaya Penanggulangan HIV/AIDS." *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol. 25 No. 23 (2012): 174-183.
- Masitho, Bahrain Dwi., Puji Lestari, dan Martien Herna Susanti. "Kehidupan Sosial Ekonomi Perempuan dalam Masyarakat Nelayan Di Desa Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara." *Unnes Civic Education Journal*, Vol. 2 No. 2 (2013) : 33-37.
- Megawangi, Ratna. *Mebiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1999.
- Mufidah, CH. "Complexities in Dealing with Gender Inequality, Muslim Women and Mosque-Based Social Services in East Java Indonesia." *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 11 No. 2 (2017): 459-488.
- Muliono. *Pengemis Perempuan: Sebuah Kajian Mengenai Gender dan Sistem Sosial*. Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta, 2016.
- Muliono dan Welhendri Azwar. *Pengemis dan Disfungsi Sistem Sosial Kultural Masyarakat Minangkabau*. Padang: Imam Bonjol Press, 2013.
- Mutatawakkil, M. Hajir. "Keadilan Islam dalam Persoalan Gender." *Jurnal Kalimah*, Vol. 12 No. 1 (2014): 67-89.
- Mutolib, Abdul, dan Yonariza. "Gender Inequality and the Oppression of Women within Minangkabau Matrilineal Society: A Case Study of the Management of Ulayat Forest Land in Nagari Bonjol, Dharmasraya District, West Sumatra Province, Indonesia." *Journal of Asian Women*, Vol. 32 No. 3 (2016): 23-49.

- Moore, Henrietta L. *Feminisme dan Antropologi*. Jakarta : Obor, 1998.
- Navis, A. A. *Alam Terkembang Jadi Guru*. Jakarta: Grafiti Pers, 1984.
- Naim, Mochtar. *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1979.
- Noerdin, Edriana dkk. *Potret Kemiskinan Perempuan*. Jakarta: Women Research Institute, 2006.
- Nurwati, Nunung. “Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan.” *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, Vol. 10 No. 1 (2008): 1-11.
- Patria, Nezar dan Andi Arief. *Antonio Gramsci, Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Pearce, Diana. “The Feminization of Poverty: Women, Work, and Welfare.” Moroney, Robert M (ed). *The Urban and Social Change Review: Special Issue on Women and Work*, Vol.11 No. 1 and 2 (1978).
- Permana, R. Cecep. *Kesetaraan Gender dalam Adat Inti Jagat Baduy*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2001.
- Platt, Maria. “Sudah Telanjur: Perempuan dan Transisi ke Perkawinan di Lombok.” *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 1 No. 2 (2012): 165-178.
- Rohmana, Jajang A. “Perempuan dan Kearifan Lokal: Pervormativitas Perempuan dalam Ritual Adat Sunda.” *Musawa*, Vol. 13 No. 2 (2014): 151-166
- Rohwerder, B. *Poverty and Inequality: Topic Guide*. Birmingham, UK: GSDRC, University of Birmingham, 2016.
- Rosidi, Ajip. *Ensiklopedi Sunda: Alam, Manusia dan Budaya*. Jakarta: Pustaka Jaya, 2001.
- Sano, Astuti. “Agency dan Resilience dalam Perdagangan Seks: Gadis-gadis Remaja di Pedesaan Indramayu.” *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 1 No. 2 (2012): 107-120.
- Schmitt, Richart. *Introduction to Marx and Engels*. Boulder, USA: Westview Press, 1987.
- Sulastri, Erni dan Sofia Retnowati. “Studi Eksploratif tentang Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Indramayu Jawa Barat.” *Psikologika*, Vol. 8 No. 16 (2003): 30-40.
- Susilo, Wahyu. *Bilateral and Regional Agreement on The Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers*. Jakarta: Migrant Care, 2003.
- Todaro, Micheal P. dan Stephen C Smith. *Economic Development*. New York: Pearson, 2015.
- Townson, Monica. *A Report Card on Women and Poverty*. Ottawa : Canadian Centre for Policy Alternatives, 2000.
- Zamzami, Lucky. “Peranan Keluarga Matrilineal Minangkabau Terhadap Kesejahteraan Perempuan Lanjut Usia.” *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 15 No. 2 (2010): 152-165.

ISSN: 1412-3460



< 1412 3467 >